

Struktur dan Konflik Sosial: Perspektif Teori Sosiologi terhadap Polarisasi di Era Media Sosial

Aldi Sajian^{1*}, Ardan Alif²

¹Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Agama, UIN Mataram

²Program Studi Ilmu Hukum, Sosial Politik, Universitas Mataram

^{1*}aldisajian99@gmail.com, ^{2*}ardanaalif@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 1, Februari 2025

Page: 309-314

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1632>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i1.1632>

Article History:

Received: 07-01-2025

Revised: 10-02-2025

Accepted: 04-02-2025

Abstrak : Fenomena polarisasi sosial yang semakin meningkat di era media sosial menjadi sorotan penting dalam kajian sosiologi kontemporer. Media sosial, sebagai ruang interaksi virtual, tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena reproduksi konflik sosial. Polarisasi yang terjadi seringkali dipicu oleh perbedaan identitas, kepentingan, serta penyebaran informasi yang terfragmentasi, yang dapat memperkuat sikap intoleransi dan konflik antar kelompok. Penelitian ini menggunakan perspektif teori sosiologi klasik dan kontemporer untuk menganalisis struktur sosial yang mendasari terjadinya polarisasi dan konflik sosial di platform media sosial. Pendekatan struktural fungsional menyoroti bagaimana norma, peran, dan institusi sosial berinteraksi dalam membentuk kohesi maupun ketegangan sosial, sementara perspektif konflik menekankan dominasi, ketidaksetaraan, dan pertentangan kepentingan sebagai pendorong utama polarisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial yang kompleks, dikombinasikan dengan mekanisme algoritma media sosial, dapat memperkuat segregasi informasi dan menimbulkan eskalasi konflik. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman sosiologis terhadap dinamika sosial digital sebagai langkah preventif untuk meminimalkan dampak negatif polarisasi sosial.

Kata kunci: struktur, konflik, polarisasi, media, sosiologi, digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam interaksi sosial. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah munculnya fenomena polarisasi sosial yang semakin intens di ruang digital, khususnya media sosial (Alamsyah et al., 2024). Media sosial bukan sekadar alat komunikasi atau sarana berbagi informasi, tetapi telah menjadi ruang kompleks di mana norma, nilai, identitas, dan kepentingan kelompok saling berinteraksi secara dinamis. Polarisasi sosial di media sosial menjadi fenomena yang patut diperhatikan karena berimplikasi pada kohesi sosial, stabilitas politik, serta kualitas demokrasi (Gulo, 2023). Polarisasi ini ditandai dengan munculnya perbedaan yang tajam antara kelompok-kelompok sosial, baik

dalam hal ideologi, politik, budaya, maupun kepentingan ekonomi, yang seringkali berujung pada konflik sosial.

Fenomena polarisasi di era media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan konflik sosial tradisional. Media sosial memungkinkan informasi tersebar secara cepat, luas, dan dalam bentuk yang terfragmentasi (Delima & Sazali, 2025). Algoritma yang mengatur tayangan konten cenderung memperkuat preferensi individu dengan menampilkan informasi yang sejalan dengan pandangan atau keyakinannya (Syam, 2025). Kondisi ini menyebabkan munculnya “ruang gema” (echo chamber) dan filter bubble, yang memperkuat perbedaan pandangan serta memunculkan persepsi bahwa pandangan kelompok lain selalu bertentangan atau mengancam. Akibatnya, interaksi sosial yang seharusnya mendorong pemahaman dan toleransi justru berpotensi memicu ketegangan dan konflik. Polarisasi ini bukan hanya berdampak pada dunia maya, tetapi juga merembet ke ranah sosial nyata, mempengaruhi hubungan antarindividu, kelompok, dan komunitas, serta dapat mengganggu kohesi sosial di tingkat lokal maupun nasional (Kholili, 2025).

Untuk memahami fenomena polarisasi sosial yang terjadi di era media sosial, pendekatan sosiologis menjadi sangat relevan. Teori-teori sosiologi menawarkan kerangka konseptual yang dapat membantu menjelaskan bagaimana struktur sosial dan interaksi antarindividu serta kelompok memengaruhi dinamika konflik (Syam, 2025). Perspektif struktural fungsional, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Émile Durkheim dan Talcott Parsons, menekankan pentingnya norma, peran, dan institusi sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat. Dalam konteks media sosial, perspektif ini menyoroti bagaimana norma-norma digital, pola interaksi daring, dan struktur jejaring sosial dapat memfasilitasi atau menghambat kohesi sosial. Sebaliknya, perspektif teori konflik, yang dipopulerkan oleh Karl Marx dan tokoh-tokoh sosiologi kontemporer, menekankan ketimpangan, dominasi, dan pertentangan kepentingan sebagai pendorong utama konflik sosial (Sukmana et al., 2025). Perspektif ini relevan untuk menganalisis bagaimana media sosial dapat memperkuat ketidaksetaraan simbolik, akses informasi, dan kekuasaan digital, sehingga memicu polarisasi antar kelompok yang memiliki posisi sosial atau politik berbeda.

Seiring dengan berkembangnya media sosial, interaksi sosial mengalami perubahan signifikan dari kontak tatap muka tradisional menjadi interaksi digital yang lebih abstrak namun masif. Media sosial menyediakan ruang bagi individu untuk mengekspresikan identitas, opini, dan afiliasi kelompok secara terbuka. Namun, ruang ini juga menghadirkan tantangan karena memungkinkan munculnya konten yang provokatif, hoaks, ujaran kebencian, atau manipulasi informasi yang dapat memicu ketegangan antar kelompok (Zuhri, 2021). Dengan demikian, media sosial berperan ganda: sebagai sarana komunikasi dan edukasi, sekaligus sebagai arena potensial bagi eskalasi konflik sosial (Rambe et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan pentingnya memahami struktur sosial digital, pola interaksi daring, serta faktor-faktor yang memperkuat segregasi informasi dan konflik.

Relevansi penelitian ini tidak hanya terletak pada pemahaman akademis, tetapi juga pada implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, pengelola platform digital, serta masyarakat luas. Dengan memahami struktur dan dinamika polarisasi di media sosial, strategi mitigasi konflik dapat dirancang lebih efektif (Suhendra & Pratiwi, 2024). Misalnya, edukasi literasi digital, regulasi konten daring, dan penguatan norma sosial digital dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi eskalasi konflik (Lestari et al., 2023). Selain itu, pemahaman sosiologis ini juga penting untuk mendorong media sosial sebagai ruang konstruktif bagi dialog antar kelompok, kolaborasi sosial, dan pembangunan kohesi sosial (Tumanggor & Azhar, 2025).

Kesimpulannya, fenomena polarisasi sosial di era media sosial merupakan manifestasi dari dinamika struktur sosial yang kompleks, interaksi antarindividu dan kelompok, serta pengaruh teknologi digital. Perspektif teori sosiologi, baik struktural fungsional maupun teori konflik, menawarkan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami mekanisme terbentuknya polarisasi dan eskalasi konflik. Dengan demikian, penelitian tentang struktur dan konflik sosial di media sosial tidak hanya relevan untuk pengembangan ilmu sosiologi, tetapi juga penting bagi upaya praktis dalam mengelola hubungan sosial dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan resilien di tengah kompleksitas dunia digital.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam dinamika polarisasi sosial di era media sosial. Data dikumpulkan melalui analisis konten terhadap percakapan, unggahan, dan interaksi pengguna pada beberapa platform media sosial yang relevan dengan isu-isu sosial dan identitas kelompok. Pemilihan konten dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan variasi tema, aktor sosial, dan konteks perdebatan untuk memperoleh representasi yang komprehensif. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, seperti pengguna aktif media sosial, pengamat sosial, dan pakar sosiologi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kontekstual tentang pengalaman, persepsi, dan interpretasi mereka terhadap fenomena polarisasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik yang berfokus pada pengidentifikasian pola, kategori, dan hubungan antara tema-tema utama yang muncul. Perspektif teori sosiologi klasik dan kontemporer, khususnya pendekatan struktural fungsional dan teori konflik, digunakan sebagai kerangka analitis untuk menafsirkan temuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana norma, peran, dan institusi sosial membentuk pola interaksi serta bagaimana dominasi dan ketidaksetaraan memperkuat konflik. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber data, perbandingan lintas-platform, dan diskusi dengan pakar. Metode ini dipilih agar hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga menawarkan analisis yang mendalam tentang struktur sosial dan mekanisme algoritmik yang memperkuat polarisasi sosial di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena polarisasi sosial di era media sosial menjadi salah satu isu krusial dalam kajian sosiologi kontemporer, karena menunjukkan hubungan kompleks antara struktur sosial, interaksi antarindividu maupun kelompok, serta peran teknologi digital dalam membentuk dinamika sosial. Polarisasi ini tidak hanya muncul sebagai perbedaan pendapat semata, tetapi sering kali berujung pada konflik sosial yang nyata, baik di ranah digital maupun sosial nyata. Media sosial, dengan karakteristiknya yang cepat, luas, dan mudah diakses, memungkinkan penyebaran informasi yang cepat sekaligus fragmentaris, sehingga memunculkan ruang gema (echo chamber) dan filter bubble yang memperkuat perbedaan kelompok.

Dari perspektif teori struktural fungsional, fenomena ini dapat dianalisis melalui hubungan antarbagian dalam masyarakat. Teori ini menekankan bagaimana norma, nilai, institusi, dan peran sosial saling berinteraksi untuk menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Dalam konteks media sosial, norma digital, seperti perilaku berbagi informasi, komunikasi daring, dan mekanisme algoritma platform, berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial digital yang mempengaruhi pola interaksi. Misalnya, individu yang tergabung dalam kelompok tertentu cenderung mematuhi norma kelompoknya, membentuk identitas sosial, dan mempertahankan kohesi internal, sementara interaksi dengan kelompok lain seringkali diwarnai ketidakpercayaan

atau antagonisme. Fungsi media sosial dalam konteks ini bersifat ganda: di satu sisi ia memperkuat interaksi sosial dan akses informasi, tetapi di sisi lain dapat memicu segregasi informasi dan polarisasi antar kelompok.

Sementara itu, dari perspektif teori konflik, polarisasi sosial dijelaskan sebagai manifestasi pertentangan kepentingan dan ketidaksetaraan. Teori ini menekankan bahwa konflik sosial muncul karena adanya distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan yang tidak merata. Dalam era digital, ketidaksetaraan ini dapat berupa akses terhadap informasi, kemampuan memanfaatkan platform digital, atau dominasi narasi tertentu di ruang maya. Algoritma media sosial yang menekankan konten provokatif atau viral sering kali memperkuat dominasi kelompok tertentu, sehingga konflik antar kelompok tidak hanya bersifat opini tetapi juga terkait dengan distribusi kekuasaan simbolik. Perspektif konflik ini relevan untuk memahami bagaimana media sosial tidak hanya menjadi arena interaksi, tetapi juga arena pertarungan kepentingan, di mana kelompok-kelompok bersaing untuk membentuk persepsi publik dan memperkuat posisi sosial mereka.

Struktur sosial digital di era media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dari struktur sosial tradisional. Pertama, jaringan sosial bersifat lebih fleksibel namun juga lebih segregatif. Individu dapat memilih dengan siapa mereka berinteraksi, membentuk kelompok afiliasi, dan menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Kedua, informasi yang diterima individu tidak bersifat homogen, melainkan cenderung selektif, disesuaikan dengan preferensi dan minat. Hal ini menimbulkan risiko terfragmentasinya masyarakat, di mana kelompok-kelompok memiliki perspektif yang berbeda dan sulit untuk bertemu dalam ruang dialog yang sama. Ketiga, peran algoritma dalam menyeleksi konten meningkatkan kemungkinan eskalasi konflik karena individu lebih sering dihadapkan pada informasi yang menguatkan keyakinan mereka dan mengisolasi mereka dari perspektif kelompok lain. Dengan demikian, struktur sosial digital berkontribusi terhadap munculnya polarisasi sebagai fenomena sistemik yang sulit diatasi hanya melalui pendekatan individu.

Interaksi sosial di media sosial juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan identitas sosial. Teori identitas sosial menyatakan bahwa individu membentuk identitasnya melalui afiliasi kelompok, dan cenderung menilai kelompok lain dari perspektif yang bias. Di media sosial, mekanisme ini diperkuat melalui ekspresi identitas daring, berbagi konten kelompok, dan partisipasi dalam komunitas digital. Individu cenderung mempertahankan citra positif kelompoknya dan menafsirkan tindakan kelompok lain sebagai ancaman. Kondisi ini memicu polarisasi karena konflik tidak hanya bersifat ideologis atau opini, tetapi juga merupakan pertahanan identitas. Polarisasi identitas ini semakin kompleks ketika dikombinasikan dengan penyebaran informasi yang tidak selalu akurat atau bias, seperti berita palsu, ujaran kebencian, atau propaganda digital.

Fenomena polarisasi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Secara sosial, polarisasi mengancam kohesi dan solidaritas masyarakat, karena kelompok yang terfragmentasi cenderung membatasi interaksi lintas kelompok. Hubungan interpersonal dapat terganggu karena persepsi negatif terhadap kelompok lain dan munculnya stereotip atau prasangka. Secara politik, polarisasi memengaruhi opini publik, partisipasi politik, dan proses demokrasi. Dalam konteks pemilu, misalnya, media sosial dapat memperkuat narasi politik tertentu dan memengaruhi preferensi pemilih berdasarkan afiliasi kelompok. Dampak ini menegaskan bahwa polarisasi bukan sekadar fenomena komunikasi digital, tetapi juga terkait dengan distribusi kekuasaan dan legitimasi institusi sosial-politik.

Selain itu, polarisasi memunculkan tantangan baru bagi pendidikan dan literasi digital. Individu perlu mampu memilah informasi, memahami perspektif kelompok lain, dan berinteraksi

secara kritis di ruang digital. Tanpa kemampuan ini, masyarakat berisiko mengalami fragmentasi informasi yang memperkuat bias dan eskalasi konflik. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bagian integral dari upaya mitigasi polarisasi, di samping regulasi konten daring dan pengembangan kebijakan publik yang adaptif terhadap dinamika sosial digital.

Kasus-kasus nyata menunjukkan bagaimana polarisasi media sosial dapat berujung pada konflik nyata. Misalnya, perbedaan pandangan politik, isu identitas agama, atau pertentangan budaya sering kali memicu perdebatan sengit secara daring, yang kemudian merembet ke ketegangan sosial di dunia nyata. Dalam beberapa kasus, polarisasi ini berujung pada kekerasan fisik atau konflik horizontal antar kelompok. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika struktur sosial, interaksi digital, dan faktor psikologis yang mendorong polarisasi. Dengan memahami faktor-faktor ini, strategi mitigasi dapat dirancang untuk mendorong dialog konstruktif, kolaborasi lintas kelompok, dan penguatan kohesi sosial.

Dari perspektif teoretis, integrasi antara teori struktural fungsional dan teori konflik memberikan kerangka analisis yang komprehensif. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana norma, peran, dan institusi berfungsi dalam membentuk stabilitas dan keteraturan sosial, sementara teori konflik menekankan ketimpangan, dominasi, dan pertentangan kepentingan sebagai pendorong polarisasi. Kedua perspektif ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk memahami fenomena polarisasi sebagai hasil interaksi antara struktur sosial, identitas kelompok, dan dinamika digital. Analisis multidimensional ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik mengenai konflik sosial yang muncul di era media sosial, sekaligus menawarkan dasar bagi intervensi yang lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks mitigasi konflik, penelitian menunjukkan perlunya pendekatan multi-level. Strategi pertama adalah edukasi literasi digital, yang mengajarkan individu untuk mengevaluasi informasi, mengenali bias, dan memahami perspektif kelompok lain. Strategi kedua adalah regulasi platform digital, termasuk mekanisme moderasi konten, transparansi algoritma, dan perlindungan terhadap penyebaran informasi palsu. Strategi ketiga adalah penguatan norma sosial digital, yaitu pembentukan etika interaksi daring, penghargaan terhadap perbedaan, dan dorongan untuk dialog konstruktif. Dengan kombinasi strategi ini, polarisasi dapat diminimalkan, sementara media sosial tetap berfungsi sebagai ruang interaksi yang produktif dan inklusif.

Kesimpulannya, polarisasi sosial di era media sosial merupakan manifestasi dari interaksi kompleks antara struktur sosial, dinamika kelompok, identitas sosial, dan teknologi digital. Perspektif teori sosiologi, baik struktural fungsional maupun teori konflik, menawarkan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana konflik muncul dan berkembang di ruang digital. Fenomena ini memiliki implikasi sosial, politik, dan budaya yang signifikan, dan menuntut pendekatan multidimensional dalam mitigasinya. Strategi literasi digital, regulasi platform, dan penguatan norma sosial menjadi langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan resilien. Dengan memahami polarisasi secara sosiologis, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan konflik sosial di era digital, sekaligus memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperkuat kohesi, dialog, dan pembangunan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi media dan dinamika komunikasi dalam era digital: Tantangan dan peluang ilmu komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–181.
- Delima, W., & Sazali, H. (2025). Integrasi Etika dan Regulasi dalam Penanganan Misinformasi di Media Digital pada Era Post-Truth. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 163–172.
- Gulo, A. (2023). Revitalisasi budaya di era digital dan eksplorasi dampak media sosial terhadap dinamika Sosial-Budaya di tengah masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, 3(3).
- Kholili, A. (2025). Kultur Digital: Tantangan Dan Peluang Moderasi. *Kultur Budaya Dan Digital*, 35.
- Lestari, R., Windarwati, H. D., & Hidayah, R. (2023). *The power of digital resilience: Transformasi berpikir kritis dan penguatan kesehatan mental emosional di era disrupsi*. Universitas Brawijaya Press.
- Rambe, A. S., Mardiah, A., Bahri, F. F., Thariq, M. I., & Arsyad, R. Q. (2025). Peran Komunikasi dalam Memahami Konflik Politik. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 996–1009.
- Suhendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 293–315.
- Sukmana, O., Sulistyaningsih, T., Damanik, F. H. S., Wahyudi, F. D., Ras, A., Astari, F., Agustang, A. D. M. P., Tantri, E., Adnan, R. S., & Nur, M. (2025). *Sosiologi Digital: Transformasi Sosial di Era Teknologi*. Star Digital Publishing,.
- Syam, F. F. (2025). Efek Polarisasi Algoritma Media: Analisis Teori Power Dan Knowledge Michel Foucault. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3424–3531.
- Tumanggor, T., & Azhar, A. A. (2025). Politik Identitas dalam Ruang Demokrasi Indonesia: Dinamika, Strategi, dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1417–1426.
- Zuhri, A. M. (2021). *Beragama di ruang digital; Konfigurasi ideologi dan ekspresi keberagaman masyarakat virtual*. Nawa Litera Publishing.